

Massa Kepung Kejaksaan Singkawang

SINGKAWANG—Sejumlah elemen masyarakat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Singkawang, Jumat (21/1). Selain mengapresiasi penuntasan kasus korupsi oleh kejaksaan, mereka juga mempertanyakan ditahannya Kepala Badan Pertahanan Nasional Singkawang Iswan, terkait kasus pengadaan tanah terminal antarnegera.

Mereka mendesak jaksa mengusut tuntas semua pihak terlibat, termasuk

Walikota Singkawang saat ini yang dituding massa sebagai pihak paling bertanggung jawab.

Tidak ada orasi yang dilakukan massa setiba di kantor Kejaksaan Negeri Singkawang. Sebelumnya massa berkumpul di halaman gedung DPRD Singkawang.

Dengan sepeda motor diparkirkan di gedung DPRD, massa berjalan kaki menuju kantor kejaksaan yang tidak jauh dari gedung DPRD. Massa pun disambut

pengawasan ketat Polres Singkawang.

Setiba di kantor Kejari, sejumlah perwakilan elemen masyarakat langsung ditemui Kasipidsus Kejari Singkawang Irwinskyah di ruangannya. Mereka adalah Dedi Mulyadi, Ridho Wahyudi, ketua MPC Pancasila Singkawang Sumarno.

Dalam pertemuan yang tak berlangsung lama tersebut. Perwakilan massa, Dedy Mulyadi menyampaikan aspirasi dan keberatan ke Kejari. Menurutnya aksi

massa kali ini bukanlah untuk menghalangi proses hukum yang sedang berlangsung, terkait kasus pengadaan tanah terminal antarnegera, apalagi mengintervensi kejaksaan.

“Kami hanya ingin mempertanyakan penahanan Kepala BPN Iswan yang notebene dalam kasus ini level bawah, sedangkan pihak-pihak di level atas tidak tersentuh, sebut saja Walikota, Wakil

◆ *Ke Halaman 31 kolom 5*

Massa Kepung Kejaksaan Singkawang

Sambungan dari halaman 25

Walikota dan pejabat lainnya," ungkapnya

Padahal jika dirunut kasus ini berawal diterbitkannya Perwako tahun 2008 oleh Walikota. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak pemkot atas pembebasan lahan terminal antarnegera.

"Kalau tidak ada perwako ini maka kasus ini juga tidak terjadi, makanya kami heran mengapa Walikota dan jajaran dibawahnya juga tidak tersentuh," tegasnya. Dikarenakan siapa pihak yang menerbitkan perwako tersebut adalah Walikota. Inilah, kata dia, yang harus juga diusut kejaksaan.

Mereka merasa keberatan dengan tindakan jaksa. Apalagi dalam laporan BPK tahun 2008 tidak ditemukan kerugian Negara dalam kasus ini. Bahkan Dedi melilai ini kesalahan administrasi yang seharusnya tidak diganjar langsung dengan penahanan pihak terkait.

"Seharusnya ada tenggat waktu perbaikan administrasi saja dan bisa diselesaikan, bukan main tahan langsung," tegasnya. Apalagi penjualan tanah ini dibawah harga nilai jual objek pajak (NJOP).

"Tanah itu dijual sekitar 134 juta-an. sementara kalau dilihat harga pasaran sudah lebih Rp 400 jutaan," katanya.

Ditambahkan Ridho Wahyudi, mereka melihat perlu diusutnya aktor intelektual dibalik terbitnya perwako dan pelaksanaan pembebasan lahan terminal antarnegera. "Adanya pembebasan lahan, lalu transaksi, kan tidak mungkin walikota tak mengetahui

masalah ini," timpalnya.

Apalagi kepala BPN adalah orang luar dipercaya menjadi sekretaris tim sembilan, namun menjadi tumbal atas permasalahan ini. Makanya pihaknya meminta kejaksaan meninjau kembali tindakan yang dilakukan

Bahkan ada Sumarno mempertanyakan apakah bedanya Walikota dan Sekda dalam kasus ini. Sehingga seolah, kata dia, Walikota tidak tersentuh kasus hukum tersebut. "Kita minta penjelasannya kepada Kejaksaan," jelasnya.

Untuk menindaklanjuti masalah ini,

perwakilan massa berencana Senin depan akan menemui Kajari, untuk melakukan permohonan penangguhan Kepala BPN Singkawang Iswan.

"Senin atau Selasa depan kita kembali memohon penangguhan penanganan Pak Iswan," jelasnya. Setelah mendengarkan buah pikiran perwakilan massa, Kasipidsus yang mengenakan setelah kaos berkrak ini, langsung menanggapi keberatan massa. Berdasarkan apa yang ia pelajari dari berkas kasus tersebut. Sudah ditetapkan tiga tersangka yakni Sekda Suhadi Abdullani selaku Ketua Tim sembilan, Kepala Kantor BPN Singkawang Iswan, sekretaris, dan Pedro Halim selaku pemilik tanah.

"Mungkin sebelum saya disini (bertugas di Kejari Singkawang, red) orang abang (sebutan perwakilan massa) sudah tahu, ada tersangka-tersangka," katanya.

Terkait Walikota, lanjut Irwinsyah memang tidak ada

dalam kasus ini. Pihaknya menganggap tiga orang ini yang bertanggung jawab.

"Kalau apakah ada kaitannya dengan walikota memang tidak ada, tapi tiga orang ini yang bertanggung jawab, ini tidak dapat dipungkiri," jelasnya. Karena pihaknya melakukan penahanan punya prosedur sendiri. Apalagi dalam kasus ini, pihaknya tidak bisa menindak orang tanpa ada bukti.

"Soal apakah walikota yang membuat perwako tapi yang jelas mereka yang diberi wewenang ini yang dianggap salah. Kecuali kalau abang memiliki bukti baru akan kita pelajari," katanya.

Ibaratlah dirinya, jelas Irwinsyah, diberi kewenangan oleh kejaksaan agung menjadi jaksa berupa sebuah surat keputusan, lalu dirinya menyelewengkan tugas amanah, lalu apakah kejaksaan agung yang harus ditindak. Makanya dalam hal ini pihaknya meminta melihat pokok masalahnya. "Yang dipelajari dari berkas tiga orang ini yang bersalah," tegasnya.

Mengenai Kepala BPN Singkawang membantah tidak bersalah, ia mengatakan itu sah-sah saja orang melakukan pembelaan diri. Namun pihaknya melihat ada ketentuan yang dilanggar pihak bersangkutan.

"Mungkin ia (Kepala BPN) kurang teliti, makanya harus hati-hati, bisa saja ia tidak korupsi, namun bisa juga dengan tindakannya memperkaya orang lain, karena sudah kena pasal tindak pidana korupsi, makanya ditahan," jelasnya.

Ia membantah pihaknya

dalam kasus ini dibawah tekanan pihak lainnya, atau disponsori. "Lillahi Ta'ala bang saya melakukan ini murni, tidak ada desakan dari pihak lain seperti bahasa abang ke saya, apalagi mensponsori tindakan jaksa ini, semuanya ada aturannya," tegasnya merespon tuduhan tindakan kejaksaan yang dianggap dipaksakan.

Terkait penagguhan penahanan, Kasipidsus mengungkapkan silakan usulkan ke kejari, nanti dipertimbangkan dan diserahkan kepada pimpinan.

Ia juga meminta dukungan massa atas penuntasan kasus korupsi di Singkawang. Sehingga di Singkawang bebas korupsi.

"Kalau mau didukung itu sangat baik kalau tidak didukung sudah lain ceritanya," ucapnya dihadapan perwakilan massa yang ditanggapi baik para perwakilan. Namun Irwinsyah kepada wartawan enggan menjelaskan ketentuan apa yang menjerat sekda dan kepala BPN sehingga ditahan di Lapas.

"Mohonlah bang, harap maklum, takut salah komentar, kita tunggu sajalah di pengadilan nanti," pintanya.

Pihak kejaksaan akan akan segera melakukan pemanggilan kedua yang ditujukan ke Sekda untuk menjalai pemeriksaan terkait pengadaan tanah antarnegera ini. Setelah pertemuan berakhir, massa pun secara tertib meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Singkawang disusul aparat kepolisian yang menjaga ketat kantor kejaksaan tersebut.

(har/zul)